

BSIP Ajak Komunitas Pertanian Ikut Sertifikasi SNI

BOGOR (IM)- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak komunitas pertanian menyongsong pasar global dengan mengikuti program sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan disetarakan dengan sertifikasi internasional.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BSIP, Fadry Djufry di sela acara gebyar agrostandar di lapangan BB Biogen Komplek BSIP Pertanian Cimanggu, Kecamatan Bogor Barat pada Rabu (20/9).

"Satu tahun usia ini, kami ingin mengedukasi publik, betapa pentingnya standarisasi untuk ke depan. Karena kalau bicara pasar global, itu menjadi penting. Apa pun yang kami bicarakan sekarang ini, kalau kami ingin bertransaksi, orang pasti bertanya apa standar yang kami gunakan," ungkap Fadry.

Fadry memaparkan, bahwa BSIP ingin memberi pesan kepada publik, terutama komunitas pertanian Indonesia. Acara gebyar Agrostandar yang dilaksanakan pada 19 September - 21 September 2023 ini bukan hanya di Bogor tetapi dilaksanakan di seluruh Indonesia, di seluruh unit kerja, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Sabang sampai Merauke.

"Dari gebyar ini, BSIP ingin mengedukasi publik, betapa pentingnya standar untuk menembus pasar global. Hari ini bagian-bagian kontribusi BSIP untuk merah putih, untuk bangsa dan negara. Bahwa meskipun BSIP baru lahir setahun ini, sudah banyak yang dihasilkan," paparnya.

Fadry menuturkan, ada lebih kurang 14 rancangan standar nasional Indonesia (SNI) yang sudah dihasilkan, selama tiga sampai empat bulan para pakar BSIP dan mitra menyusun. Di antaranya, empat SNI termasuk satu SLPro yang sudah selesai. Ke depan akan didorong, SLPro yang disiapkan satu dua bulan ini.

"Yakni ada LSPro Perkebunan, SLPro Tanaman Pangan, LSPro Peternakan dan Kesehatan Hewan, LSPro Holtikultura, LSPro Pertanian, LSPro Halal Food serta LSPro lain-lain. Sementara ini telah diinisiasi, LSPro Personal terkait bagaimana optimalisasi sumber daya Indonesia," tuturnya.

Sementara Sekretaris BSIP, Haris Syahbudin menjelaskan, bahwa Gebyar Agrostandar merupakan kegiatan untuk membudayakan standarisasi di bidang pertanian. Harapannya Agrostandar semakin memasyarakat. Penerapan standarisasi, mulai dari hulu seperti pengolahan, penyiapan lahan, penggunaan bibit dan benih, termasuk penggunaan pupuk dan pestisida, dapat semakin baik karena adanya penerapan standar tersebut.

"Jadi, jangan ragu-ragu menerapkan standar. Itu penting. Memang menerapkan standar memerlukan alat, keahlian, keterampilan yang dianggap sebagai biaya. Padahal kalau produknya terstandar, itu harga produknya bisa naik juga," pungkasnya. ● pra

396.475 KPM di Kab. Bogor Dapat Bantuan Beras dari Bappanas dan Bulog

CIBINONG (IM)- Sebanyak 396.475 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bogor akan mendapatkan bantuan cadangan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bappanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Bantuan cadangan pangan beras sebesar 10 Kg perbulan ini merupakan tahap kedua untuk Bulan September, Oktober dan November, setelah di tahap I disalurkan ke KPM pada Bulan Juni, Juli dan Agustus kemarin dengan jumlah yang sama.

"Bantuan pangan cadangan beras tahap II sedang dan akan disalurkan ks 396.475 KPM untuk periode Bulan September, Oktober dan November, bantuan ini merupakan intervensi pemerintah pusat melalui Bappanas, Bulog dan PT Pos Indonesia," ujar Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Bogor, Budi Cahya Wiryadi kepada wartawan, Rabu (20/9).

Budi Cahya Wiryadi menuturkan

lain selain cadangan pangan beras, 52.348 Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan PT Pos Indonesia juga akan mendapatkan bantuan daging ayam dan telur ayam.

Bantuan daging ayam 1 Kg dan 10 butir telur ayam akan disalurkan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (IDFOOD) dan PT Pos Indonesia. "Penyaluran bantuan 1 Kg daging ayam dan 10 butir telur ayam ini untuk mencegah bayi terkena stunting, dan data baik itu KPM maupun KRS sudah ada dari pemerintah pusat," tutur Budi Cahya Wiryadi.

Ia menjelaskan bahwa bantuan cadangan pangan beras, daging ayam dan telur ayam untuk Kabupaten Bogor, kuotanya terbesar dibanding 27 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. "Kuota bantuan cadangan pangan beras, daging ayam dan telur ayam untuk Kabupaten Bogor, sejauh ini yang terbesar karena memang jumlah penduduknya terbanyak di Jawa Barat," jelasnya. ● gio

DPRD Provinsi Jabar dan Pemkab Bogor Persiapan Pembentukan Otonomi Baru



DPRD Provinsi Jabar bersama Pemkab Bogor saat membahas percepatan calon daerah persiapan Otonomi Baru Bogor Barat dan Timur.

BOGOR (IM)- Pemkab Bogor bersama DPRD Pemprov Jawa Barat melakukan Hearing Kick Off Penataan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Barat, di Hotel Lorin Sentul Babakan Madang, Selasa (19/9).

Hal ini untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu diketahui cakupan Calon Daerah Persiapan (CDP) Kabupaten Bogor Barat meliputi 14 kecamatan dan 166 desa dengan calon ibukota berada di wilayah Kecamatan Gigdeg. Sedangkan untuk CDP Kabupaten Bogor Timur meliputi 7 kecamatan dan 75 desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, rencana pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah sejak lama diusulkan yakni sejak tahun 2000 lalu. Di mana usulan tersebut bukan hanya didasari oleh keinginan melainkan lebih pada kebutuhan, agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa merata dan lebih efektif.

"Atas nama Pemkab

Bogor kami sampaikan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur bisa terealisasi mengingat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor," jelas Sekda Burhanudin.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat menyampaikan, saat ini ada sekitar lebih dari tiga ratusan Calon Daerah Persiapan (DCP) pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Timur. Bahkan Kabupaten Bogor ini jadi daerah prioritas pemekaran mengingat jumlah penduduk yang besar dengan wilayah yang sangat luas.

"Kabupaten Bogor sudah sangat layak dimekarkan, ini harus jadi perhatian kita bersama dan hasil kegiatan ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat. Semoga segera diputuskan moratorium agar pemekaran bisa segera terwujud demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," tukas Achmad Ru'yat. ● gio

8 Nusanantara



IDN/ANTARA

SAMPAH MENUMPUK DI BANDUNG

Kendaraan melintas di samping TPS Gudang Selatan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/9). Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat, sebanyak 25 ribu ton sampah di Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat masih menumpuk di TPS dan sejumlah titik lainnya akibat area utama TPA Sarimukti masih terbakar.

Dishub Kota Bandung 'Sering' Ngumpulin Uang THR Buat Pejabat dan DPRD

Kasubag Keuangan Dishub Kota Bandung, Kalteno, mengungkapkan hal ini saat dimintai kesaksiannya pada sidang kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) pada program Bandung Smart City yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/9).

BANDUNG (IM)- Dishub Kota Bandung, kerap membagikan sejumlah uang untuk para pejabat lingkungan Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung, dan instansi lainnya.

Hal itu diungkapkan Kasubag Keuangan Dishub Kota Bandung, Kalteno, saat ia dim-

intai kesaksiannya pada sidang kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) pada program Bandung Smart City yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/9).

Pada awalnya, JPU KPK menanyakan soal fee proyek.

Kalteno pun menjawab fee proyek didapat dari setiap bidang-bidang yang didapat dari pihak ketiga (pemenang proyek).

Adapun uang fee proyek itu dikumpulkan lalu digunakan untuk THR ke pihak-pihak di lingkungan Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung, dan instansi lainnya.

Pengumpulan uang fee proyek itu, ia lakukan sejak 2020. Di mana kala itu Dishub Kota Bandung dijabat oleh Ricky Gustiadi. Kalteno pun mengungkapkan jika pengumpulan uang fee proyek diperintahkan langsung oleh Ricky Gustiadi.

Kalteno pun mengatakan pada 2020, fee proyek yang berhasil dikumpulkan mencapai

Rp 1,07 miliar. Ia mengatakan uang-uang tersebut berasal dari fee proyek sebesar 5 persen dari pelaksanaan proyek.

"Di BAP saksi, tahun 2020, uang saksi kumpulkan Rp 1,07 miliar dan ini diperoleh dari bidang-bidang?," tanya jaksa.

"Iya betul," jawab Kalteno.

Uang-uang tersebut selanjutnya dibagikan sebagai uang THR kepada pejabat di lingkungan Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung serta pihak eksternal Dishub Kota Bandung. Pada tahun 2021, uang yang dikumpulkan dari bidang-bidang mencapai Rp 805 juta.

Uang tersebut kembali diberikan kepada pejabat di

lingkungan Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung. Untuk DPRD diberikan untuk keperluan makan dan minum.

Tahun 2022 dan 2023, ia mengaku tidak lagi diperintah mengumpulkan uang dari bidang-bidang. Sebab, Kepala Dinas Perhubungan telah berganti dari Ricky Gustiadi ke Dadang Darmawan. Namun, mengetahui aliran THR tetap masih berlangsung.

Selain Kalteno, ada tiga orang saksi lainnya, ada beberapa saksi lainnya yang turut dihadirkan, mereka yakni staf kasubag keuangan dishub Nur Aini Ismail, PHL operator ATCS Asep Gunawan dan Nadia. ● pra

Tim Asesor Kemenpan RB Evaluasi Penerapan Indeks SPBE Kab. Bogor

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bogor melakukan Evaluasi Interviu SPBE tahun 2023 oleh tim Asesor Kemenpan RB secara daring, yang berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Selasa (19/9).

Evaluasi Interviu SPBE merupakan salah satu tahap dari serangkaian kegiatan evaluasi SPBE, yang sebelumnya telah dilaksanakan penilaian mandiri SPBE oleh Asesor Internal. Sementara untuk interviu secara daring asesor eksternal dari Kemenpan RB bertujuan untuk untuk memverifikasi hasil penilaian mandiri SPBE sebelumnya.

Perlu diketahui beberapa poin domain kebijakan SPBE yang dinilai meliputi kebijakan atau dasar hukum kegiatan implementasi SPBE di Kabupaten Bogor, Domain Tata Kelola SPBE meliputi proses/implementasi SPBE, lalu Domain Manajemen SPBE merupakan proses/implementasi dari penerapan manajemen yang telah di-

laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Serta Domain Layanan SPBE meliputi penerapan penggunaan terhadap layanan aplikasi sejenis, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor atau menggunakan aplikasi umum/pusat.

Asisten Administrasi Umum Setda, Ade Jaya Murni mengungkapkan bahwa, Pemkab Bogor saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan komitmen tata kelola pemerintahan yang baik khususnya melalui implementasi SPBE dilingkup Pemkab Bogor. Tentunya yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

"Kami terus berupaya dan komitmen dalam menerapkan dan meningkatkan capaian nilai SPBE di Kabupaten Bogor. Mari kita implementasikan SPBE dibuktikan dengan kinerja yang akuntabel, penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Ade Jaya.

Di tempat yang sama, Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten

Bogor, Dadang Imansyah menyampaikan, beberapa layanan terintegrasi yang dilakukan untuk mendorong optimalisasi SPBE di antaranya, layanan aplikasi E-Sakip dengan Si Cantik.

Kemudian layanan Aplikasi Atisibada dengan Simral dan layanan publik lainnya yang sudah terintegrasi juga dalam aplikasi single sign on Kabogoh Idaman, seperti E-SPPT Online, kegawatdaruratan Call Center 112 dan aplikasi perizinan Optimis.

"Kami harap dapat mendorong percepatan digitalisasi di pemerintahan Kabupaten Bogor terutama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," tuturnya.

Bahkan dirinya optimis Indeks SPBE Kabupaten Bogor tahun 2023 bisa meningkat di angka 3,36 yang saat ini nilai SPBE tahun 2022 berada di angka 3,33 dengan predikat baik.

"Mudah-mudahan target Indeks SPBE bisa tercapai dengan optimal," tukas Dadang. ● gio



Tim Asesor Kemenpan RB evaluasi penerapan indeks SPBE Kabupaten Bogor melalui Daring.

Bupati Bogor Instruksikan Jajarannya Tidak Ego Sektoral



IST

Bupati Bogor Iwan Setiawan minta jajarannya tidak ego sektoral.

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menginstruksikan jajarannya agar bersinergi dan kolaborasi antar-sektor dan stakeholder. Hilangkan sikap egosentris atau ego-sektoral karena berbagai permasalahan di masyarakat itu lintas sektoral, lintas wilayah, penanganannya harus sinkron dan terintegrasi.

Pernyataan politisi Gerindra ini dikemukakan saat pelantikan dan Pengambilan Sumpah pegawai di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah dan malam hari di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (19/9).

Iwan Setiawan mengingatkan agar yang baru saja dilantik segera menyesuaikan tugas masing-masing dan langsung bekerja efektif.

Total ada 94 pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) yang dilantik. Sebanyak 91 orang dilantik pada sore hari, dan 3 orang lainnya menyusul karena salah satunya baru selesai ibadah umroh sementara dua lainnya harus menyesuaikan karena saling terkait.

Hadir pada pelantikan tersebut, Forkopimda Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, Direksi BUMD dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan kepada para pejabat yang dilantik

bahwa waktu bekerja efektif periode RPJMD 2018-2023 kurang dari empat bulan lagi. Untuk itu semua pejabat baru agar segera menyesuaikan, pahami tugas masing-masing dan langsung bekerja efektif untuk akselerasi pencapaian target pembangunan, baik terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati maupun IKU perangkat daerah.

Bekerja berbasis data, kolaborasi intensif dengan mitra strategis, jangan sekadar menggugurkan kewajiban. Harus kreatif, inovatif dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal," tandas Iwan Setiawan.

Iwan menjelaskan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar juga untuk pengembangan karier pegawai. Ketika sudah ada Pj Bupati Bogor nantinya tinggal bekerja dengan maksimal saja dengan formasi birokrasi yang sudah lengkap.

"Jangan sampai nantinya Pj Bupati sibuk untuk mengisi jabatan kosong baik itu promosi maupun mutasi, saat mulai bertugas selama satu tahun lebih, jadi sekarang kita isi dulu kekosongannya," kata Iwan.

Ia juga mengucapkan, selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jalankan amanah dengan semangat dan etos kerja yang baik untuk membangun daerah dan melayani masyarakat. ● gio